

VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan mengenai model pelayanan administrasi kependudukan adalah:

- a. Proses Pembuatan Administrasi Kependudukan

Proses pembuatan administrasi kependudukan yang begitu panjang banyak yang tidak melalui prosedur yang berlaku karena dalam pementannya administrasi kependudukan masyarakat tidak mengurus sendiri melainkan dilakukan oleh sekdes, dikarena kesibukan dan kurang pahamnya masyarakat dalam pengurusan administrasi kependudukan.

- b. Waktu yang Dibutuhkan untuk Pengurusan Administrasi Kependudukan

Ketidakjelasan waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa sampai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat masyarakat meminta pelayanan kepada sekdes untuk mengurus data

kependudukan di Dinas Capil Kabupaten Way Kanan dan lebih mementingkan mengurus pekerjaan di perkebunan.

c. Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan

Transparansi yang kurang mengenai biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk memperoleh bayaran dengan membantu pembuatan data administrasi kependudukan dengan pelbagai alasan dimana biaya yang dalam pengurusan data kependudukan pada Dinas Capil adalah gratis.

d. Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Sekdes

Tingkat pendidikan yang masih rendah paling tinggi tingkat pendidikan sekdes di Kecamatan Negeri Agung adalah SMU, sedangkan masih banyak yang SMP bahkan SD. Pelatihan guna meningkatkan kompetensi sekdes juga belum pernah dilakukan terutama dalam pengisian rekapitulasi jumlah penduduk yang berbentuk LAPID.

e. Lokasi dan Peralatan Pendukung Pemberian Pelayanan

Sebagian besar Sekdes di Kecamatan Negeri Agung dalam pemberian pelayanan dilakukan pada rumah sekdes bukan pada kantor desa, walaupun telah memiliki kantor desa. Peralatan yang dimiliki sudah sesuai dalam penunjang kinerja, namun

masih kurang dalam perawatan dan penggunaan peralatan kantor yang belum maksimal oleh sekdes.

Dengan demikian model pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Negeri Agung belum maksimal. Sifat kekeluargaan yang masih kental pada masyarakat desa cenderung membuat prosedur pembuatan data administrasi kependudukan menjadi salah karena dalam pembuatan berwakil bukan yang bersangkutan. banyak yang harus diperbaiki dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

2. Faktor Penghambat Pelayanan Administrasi Kependudukan

Faktor yang menghambat pelayanan administrasi kependudukan adalah banyaknya fasilitas kantor yang rusak, tidak optimalnya dalam penggunaan peralatan kantor yang ada, serta dalam pengurusan administrasi kependudukan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah, masyarakat justru meminta bantuan dengan memberi imbalan kepada sekdes untuk mengurus administrasi kependudukan walaupun menyalahi prosedur yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Model pelayanan administrasi kependudukan

a. Proses Pembuatan Administrasi Kependudukan

Pemerintah melalui KTP elektronik merupakan salah satu jawaban dalam proses perbaikan data kependudukan, diharapkan tidak hanya KTP saja yang masuk dalam database kependudukan, data kependudukan dari lahir sampai kepada yang meninggal juga harus tercatat pada database. E-KTP diberlakukan seumur hidup agar perpanjangan KTP elektronik tidak kembali kepada model pelayanan tradisional, dikarenakan data base masyarakat yang telah memiliki e-KTP sudah terekam pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Melakukan kerjasama dengan Dinas pendidikan dalam pembuatan KTP karena usia anak SMA telah memenuhi syarat untuk memiliki KTP.

b. Waktu yang Dibutuhkan untuk Pengurusan Administrasi Kependudukan

Kejelasan waktu dalam pengurusan administrasi kependudukan mulai dari tingkat desa sampai kepada Dinas Capil Kabupaten Way Kanan, sehingga masyarakat dapat mengatur dan memperkirakan

berapa lama waktu yang diperlukan dalam pengurusan administrasi kependudukan yang akan diurus.

c. Biaya Pelayanan Administrasi Kependudukan

Transparansi biaya dalam pengurusan administrasi kependudukan baik dari tingkat desa sampai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, biaya yang dikeluarkan haruslah kecil dalam memperoleh pelayanan, agar terjangkau oleh masyarakat apabila memungkinkan biaya pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya (gratis) karena pelayanan pemerintah bukan mencari keuntungan.

d. Tingkat Pendidikan dan Kompetensi Sekdes

Penataan kembali pegawai mulai dari desa, melihat tupoksi sekdes yang begitu besar bisa disamakan eselonnya dengan sekretaris kelurahan agar dapat meningkatkan kinerja. Untuk meningkatkan kompetensi sekdes dilakukan pelatihan terutama administrasi kependudukan agar lebih paham pentingnya data kependudukan untuk pembangunan serta hasil pelatihan benar-benar dilakukan evaluasinya.

e. Lokasi dan Peralatan Pendukung Pemberian Pelayanan

Pelayanan yang diberikan apabila pelayanan diberikan pada tempat yang tepat, apabila desa telah memiliki kantor desa pelayanan akan maksimal dilakukan pada kantor desa agar masyarakat sebagai

penerima layanan tidak canggung atau malu untuk datang kerumah sekdes. Peralatan pendukung juga harus dirawat dalam penggunaannya serta perlu dilakukan pelatihan penggunaan computer karena banyak sekdes yang kurang mengerti dalam penggunaannya.

2. Faktor Penghambat Pelayanan Administrasi Kependudukan

Peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurus sendiri data kependudukan melalui sosialisasi sekdes. Dalam pengurusan administrasi kependudukan, sekdes dilarang memberi bantuan yang bukan menjadi wewenangnya.